

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Profitabilitas

Menurut KBBI, profitabilitas adalah kemampuan atau kemungkinan untuk mendatangkan keuntungan (memperoleh laba) (*kbbi.web.id*, n.d.). Dalam meninjau kinerja keuangan suatu perusahaan, profitabilitas merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan salah satu jenis dari rasio keuangan. Selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, rasio profitabilitas juga berfungsi untuk mengukur efektifitas operasional yang telah dicapai perusahaan pada suatu periode tertentu. Berikut merupakan beberapa jenis rasio profitabilitas yang biasa digunakan dalam meninjau profitabilitas suatu entitas usaha.

1) Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor atau *Gross Profit Margin (GPM)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi Harga Pokok Penjualan. Semakin besar *GPM* suatu perusahaan, maka semakin efisien Harga Pokok Penjualan perusahaan tersebut. *GPM* dapat dihitung dengan rumus:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

2) Margin Laba Operasi (*Operating Profit Margin*)

Margin laba operasi atau *Operating Profit Margin (OPM)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi biaya operasional. Semakin besar *OPM* suatu perusahaan, maka semakin efisien biaya operasional yang digunakan perusahaan tersebut. *OPM* dapat dihitung dengan rumus:

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}}$$

3) Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Margin laba bersih atau *Net Profit Margin (NPM)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi seluruh biaya yang digunakan oleh perusahaan. Semakin besar *NPM* suatu perusahaan, maka semakin efisien penggunaan biaya pada perusahaan tersebut. *NPM* dapat dihitung dengan rumus:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

4) Rasio Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover Ratio*)

Rasio Perputaran Persediaan atau *Inventory Turnover Ratio (ITR)* adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa kali perusahaan menjual dan (diasumsikan) mengganti persediaan yang ada pada gudang. Semakin tinggi *ITR* suatu perusahaan, maka semakin cepat perputaran persediaan yang dimiliki suatu perusahaan. *ITR* dapat dihitung dengan rumus:

$$ITR = \frac{\text{Beban Pokok Penjualan}}{[(\text{Persediaan Awal} + \text{Persediaan Akhir})/2]}$$

2.2 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

Produk ubin keramik merupakan salah satu produk yang berperan penting dalam industri konstruksi. Pada pertengahan tahun 2021, industri keramik Indonesia menempati peringkat delapan dunia dengan kapasitas produksi yang terpasang sebesar 538 juta m^2 per tahun (*Medcom.Id*, n.d.). Meskipun demikian, pada periode 2016-2020 terjadi peningkatan jumlah impor barang ubin keramik sebesar 5,17% (*InfoPublik*, n.d.). Selain itu, impor ubin porselen pada periode Januari – Mei 2021, mengalami kenaikan 32,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*Suara.com*, n.d.).

Pada awal Oktober 2018, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memberlakukan PMK Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik, untuk melindungi industri keramik lokal. Besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) ini yakni 23% pada tahun pertama, 21% pada tahun kedua, dan 19% pada tahun ketiga (dengan periode satu tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PMK ini). Meskipun demikian, tidak semua negara pengimpor ubin keramik dikenakan BMTP tersebut. Terdapat 125 negara yang dikecualikan dalam PMK ini, termasuk India dan Vietnam. Karena hal tersebut, impor ubin keramik dari India dan Vietnam pada periode 2018-2019 melonjak masing-masing sebesar 22,72% dan 6,58% (*Liputan6.Com*, n.d.). Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan PMK Nomor 111/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan

Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Dalam PMK perubahan ini, India dan Vietnam dikeluarkan dari daftar negara yang dikecualikan pada pengenaan BMTP. Selain itu, PMK perubahan ini juga membuat regulasi dari pengenaan BMTP ini semakin ketat, yang diharapkan dapat mencapai tujuan sebagaimana peraturan ini ditetapkan sejak awal.

2.3 Persediaan

2.3.1 Definisi Persediaan

Berdasarkan paragraf 06 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14 (PSAK 14), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa, persediaan merupakan aset yang:

- 1) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa;
- 2) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- 3) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Sementara itu, menurut Weygandt, Warfield, dan Kieso (2015), persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnisnya atau barang yang digunakan untuk memproduksi barang yang akan dijual.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki suatu entitas bisnis dengan tujuan untuk dijual atau aset dalam bentuk bahan dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi atau pemberian jasa dalam lingkup kegiatan bisnis.

2.3.2 Klasifikasi Persediaan

Dalam paragraf 37 PSAK 14, klasifikasi persediaan yang biasa digunakan antara lain: barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan, barang dalam proses, barang jadi, serta pekerjaan dalam proses (untuk entitas pemberi jasa).

Horngren, *et al.* (2015) menjelaskan bahwa perusahaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu perusahaan sektor manufaktur, perusahaan sektor perdagangan, dan perusahaan sektor jasa/pelayanan. Perusahaan sektor manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan dan komponen yang nantinya akan diubah menjadi berbagai jenis barang jadi. Perusahaan sektor perdagangan adalah perusahaan yang membeli dan menjual barang barang berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Perusahaan sektor jasa/pelayanan adalah perusahaan yang menyediakan jasa atau barang tidak berwujud. Pada perusahaan sektor manufaktur, persediaan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan baku langsung (*direct materials*), barang setengah jadi (*work in process*), dan barang jadi (*finished goods*). Bahan baku langsung merupakan bahan baku yang yang digunakan dalam proses produksi. Sementara itu, barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam tahap produksi dan umumnya belum siap untuk dijual, sedangkan barang jadi adalah barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual namun belum terjual.

2.3.3 Pengukuran Persediaan

Warren *et al.* (2018) menjelaskan mengenai pengukuran persediaan dengan metode the *lower-cost-or-market (LCM)*. Pengukuran persediaan dengan

metode ini dilakukan dengan membandingkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto suatu persediaan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam paragraf 09 PSAK 14, persediaan juga diukur pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa biaya persediaan diakumulasi dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

Biaya pembelian terdiri dari harga beli, bea impor, pajak lainnya (selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Di samping itu, diskon dagang, rabat dan hal serupa lain yang dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Biaya konversi persediaan mencakup biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, seperti biaya tenaga kerja langsung, alokasi sistematis *overhead* produksi tetap, dan *overhead* produksi variable yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. *Overhead* produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relative konstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, sedangkan *overhead* produksi variable adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung, atau hampir secara langsung, mengikuti perubahan volume produksi. *Overhead* produksi tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan pada kapasitas fasilitas produksi normal, yang dalam hal ini adalah produksi rata-rata yang diharapkan akan

tercapai dalam suatu periode normal, dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas selama pemeliharaan terencana.

Biaya lain yang dapat dialokasikan ke biaya persediaan hanya untuk biaya yang timbul agar persediaan berada dalam kondisi serta lokasi saat ini. Contoh biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya antara lain:

- 1) jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya;
- 2) biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi selanjutnya;
- 3) biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini; serta
- 4) biaya penjualan.

2.3.4 Sistem Pencatatan Persediaan

Sistem pencatatan persediaan digunakan untuk memudahkan perusahaan dan pengguna lainnya untuk memahami laporan keuangan dengan baik. Pencatatan barang yang masuk dan keluar harus dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat hilangnya barang setelah dibeli serta untuk meminimalisir pemborosan bahan baku (Warren *et al.*, 2018).

Kieso *et al.* (2015) membagi sistem pencatatan persediaan menjadi 2, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Pada sistem perpetual, pembelian dan penjualan persediaan langsung dicatat ke akun persediaan ketika transaksi terjadi. Hal inilah yang menyebabkan saldo Harga Pokok Penjualan dapat diketahui setiap

saat. Berbeda dengan perpetual, sistem periodik mencatat pembelian pada akun Pembelian, sehingga saldo Harga Pokok Penjualan tidak dapat diketahui setiap waktu. Umumnya, perusahaan menghitung saldo Harga Pokok Penjualan pada akhir periode dengan menjumlahkan saldo Persediaan awal periode dengan saldo Pembelian selama periode tersebut kemudian dikurangi dengan saldo Persediaan akhir periode.

Tabel II.I Penjurnalan Sistem Pencatatan Persediaan

Sistem Perpetual		Sistem Periodik	
Jurnal Pembelian			
Persediaan	xxx	Pembelian	xxx
Utang Dagang	xxx	Utang Dagang	xxx
Jurnal Penjualan			
Piutang Dagang	xxx	Piutang Dagang	xxx
Penjualan	xxx	Penjualan	xxx
Harga Pokok Penjualan	xxx		
Utang Dagang	xxx		
Jurnal Akhir Periode			
Tidak ada penjurnalan		Persediaan (Akhir)	xxx
		Harga Pokok Penjualan	xxx
		Pembelian	xxx
		Persediaan (Awal)	xxx

Sumber: Kieso *et al.* (2015)

2.3.5 Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Berdasarkan PSAK 14, pengungkapan persediaan pada laporan keuangan setidaknya mengungkapkan beberapa hal yang tercantum pada paragraf 36. Beberapa hal tersebut, antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan; total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas; jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual; jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan; jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban; jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang dimaksud sebelumnya; keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan; dan jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.